

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 November 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NELSON METUBUN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **211434**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **357.500.000**

1. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 107.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **300.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO-5 METIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, MAZDA CX7 CX7 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **678.704****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **658.178.704****III. HUTANG** Rp. **196.200.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **461.978.704**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.